

PERS PANCASILA KEHIDUPAN PERS PADA MASA ORDE BARU (TAHUN 1978 – TAHUN 1993)**ARFANDIANTO**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
Email: Arfandianto14@gmail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian mengenai pers Pancasila Orde Baru merupakan hal yang menarik, karena pers Pancasila memiliki peranan yang besar dalam sejarah perkembangan kehidupan pers Indonesia. pada masa ini pers mengalami perkembangan yang signifikan di bidang ekonomi dan redaksional pers sementara pembreidelan dan kebebasan pers masih berada dibawah kontrol pemerintah.

Secara umum penelitian ini menjelaskan tentang; 1) Latar belakang dan lahirnya pers Pancasila; 2) implementasi pers Pancasila; dan 3) dampak pers pancasila terhadap kehidupan pers masa Orde Baru. sumber diambil dari surat kabar sejaman dan berbagai peraturan pemerintah mengenai pers Pancasila, jurnal serta buku.

Pers pancasila secara politis dilatarbelakangi oleh dua peristiwa besar pembreidelan pers masa Orde Baru yakni peristiwa Malari pada Januari 1974 yang membawa imbas pada pembreidelan permanen 12 surat kabar dan pembreidelan massal sementara pada bulan Januari 1978 terhadap 14 penerbitan termasuk 7 surat kabar utama di Jakarta.

Perbedaan sikap yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru terhadap dua pembreidelan Januari 1974 dan Januari 1978 merupakan perubahan pola sikap Orde Baru yang mengisyaratkan keinginan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pers dari dalam karena dirasa lebih efektif pada breidel sementara Januari 1978, untuk itulah pemerintah Orde Baru memberikan “jaminan” berupa Ketetapan MPR No. II & IV tahun 1978 mengenai rencana perubahan Undang-Undang Pokok Pers dan untuk menenangkan pers nasional yang bergejolak.

Keinginan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pers dari dalam berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 mengenai berlakunya sistem pers Pancasila dan penghapusan Surat Izin Terbit untuk meyakinkan pers kepada pemerintahan Orde Baru dan bahwa sistem pers yang baru merupakan sistem pers yang bebas dari sensor dan breidel sesuai dengan yang diharapkan oleh penerbitan pers. Tahun 1984 sistem pers Pancasila diterima sebagai sistem pers Indonesia oleh Dewan Pers melalui Sidang Pleno Dewan Pers ke XXV di Surakarta.

Tahun 1984 menjadi tahun dimana permainan politik Orde Baru atas kebebasan pers terlihat nyata dan terstruktur setelah disahkannya Peraturan Menteri Penerangan (PERMENPEN) No. 1 Tahun 1984 oleh Menteri Penerangan Harmoko yang berisi tentang pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kebebasan pers atas breidel menjadi hal yang tidak bisa dijamin lagi setelah keluarnya Permenpen ini. Pencabutan surat izin pun terjadi pada masa berlakunya pers Pancasila, beberapa pembreidelan diantaranya surat kabar Sinar Harapan pada tahun 1986, surat kabar Prioritas pada tahun 1987 dan tabloid mingguan Monitor pada Oktober 1990.

Berlakunya kebijakan sistem pers Pancasila pada masa Orde Baru membawa berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan pers Indonesia, dari segi dampak positif, terjadi peningkatan profesionalitas wartawan, peningkatan kemampuan insan pers dalam mengolah pemberitaan, peningkatan minat baca masyarakat. Terjadinya ekspansi perusahaan besar pers kepada surat kabar kecil yang meliputi sebagian besar kota-kota di Indonesia membawa dampak pada penyebaran surat kabar yang lebih merata dan stabilnya tiras dari imperium besar pers.

Dampak negatifnya kebebasan pers menjadi sangat terbatas karena adanya SIUPP, pers Pancasila digunakan sebagai pelindung berlangsungnya pemerintahan Orde Baru atas kritik sosial pers dari dalam tubuh pers itu sendiri. pers kehilangan fungsi sebagai kritik sosial, kebebasan pers menjadi semu karena pers harus mematuhi rambu pemerintah Orde Baru untuk tetap hidup dan menghindari kerugian besar karena breidel.

Kata Kunci: Sistem Pers Pancasila, pers Orde Baru, Kebebasan Pers, Pers Industri, SIUPP.

Abstract

Research about Pancasila press on Orde Baru era is interesting, it's because Pancasila press has a big role in history of Indonesia's press development. Press at this era has a good economic and redaction development although breidel and freedom of press are under controlled by the government.

Commonly this researches are explain about; 1) The born of Pancasila press system and it's background; 2) implementation of Pancasila press; 3) the impact of Pancasila press to the living of press at Orde Baru era. Database taken from newspaper in same time and government policies, and also book and journal.

Pancasila press politically motive by two big restraints event in Orde Baru era, they are Malari event at January 1974 that impact to permanently restraints of 12 newspaper and temporally restraints at Januari 1978 to 14 press included 7 big newspaper in Jakarta.

The different way that taken by Orde Baru government about two big restraints at January 1974 and January 1978 are showing government interest to made an unity with press from the inside effectively in temporally restraints at Januari 1978, in order to that the government of Orde Baru made an Ketetapan MPR Number II & IV year 1978 about plan to change major press policy in order to made a good relationship with press.

Government interest to make an unity with press from the inside effectively continued with Undang-Undang Number. 21 year 1982 about major press policy, Pancasila press and also abolition of Surat Izin Terbit to ensure press that Pancasila press as new policies are using freedom of press. In 1984 Pancasila press system accepted by Dewan Pers as an Indonesian press system in 25th Sidang Pleno Dewan Pers at Surakarta.

Political game of Orde Baru at freedom of press in 1984 really displayed with Peraturan Menteri Penerangan (PERMENPEN) Number 1 year 1984 by Menteri Penerangan Harmoko that contain about restraints of Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Freedom of press from restraints cannot guaranteed again after endorsement of that PERMENPEN. Many restraints showed at Pancasila press system era, they are Sinar Harapan at 1986, Prioritas at 1987 and weekly tabloid 'Monitor' at October 1990.

Endorsement of Pancasila press system at Orde Baru era brought many impact to the living of Orde baru press. The positive impact. Professionality of journalist is improved, improvement of news content, increasing of reading interest and expansion of big press industry to little newspaper industries in big cities bring a good impact to deployment of press and economic stability of press.

The negative impact are: restraints freedom of press because of SIUPP endorsement, Pancasila press used by Orde Baru government to defend their power from press criticism from the inside. Press losing their social criticism, freedom of press being absurd, press must to obey the rules of Orde Baru government in order to make them still alive and avoid economic loss because of restraints.

Keywords: *Pancasila Press System, Orde Baru Press, Freedom of Press, Press Industry, SIUPP*

PENDAHULUAN

Pers Pancasila merupakan sebutan sistem pers Indonesia yang berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru. Pers Pancasila merupakan perwujudan ide pers Indonesia yang berlandaskan idiil pada lima sila dasar dalam Pancasila. Perwujudan ideologi bangsa dalam sistem pers ini sekaligus juga menjadi identitas bangsa Indonesia dan membedakan sistem pers yang dianut oleh Indonesia dengan sistem pers dari berbagai Negara lain seperti Amerika, Rusia, Korea Selatan, Inggris dan sebagainya, hal ini menjadi menarik karena ideologi Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan secara otomatis maka pers Pancasila merupakan sistem pers yang hanya dimiliki Indonesia.

Pers Pancasila menjadi salah satu perwujudan ide yang sejatinya tepat dalam menata kehidupan pers Indonesia, meskipun terbilang terlambat karena baru pada akhir tahun 1970-an konsep tentang pers Pancasila mengalami pematangan oleh pemerintah setelah terjadinya berbagai peristiwa yang

menghebohkan pers Indonesia dengan dibreidelnya berbagai surat kabar pada 1974 dan berbagai pembreidelan pers tahun-tahun sebelumnya yang tidak mencerminkan pers yang bebas. Pers Pancasila menjadi opsi bagi pemerintahan Orde Baru untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupan pers agar menjadi pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggungjawab serta dapat menjalankan kembali fungsi, tugas dan kewajibannya dengan baik.

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia mulai gencar dikampanyekan oleh pemerintah Orde Baru dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama pada pertengahan tahun 1970-an. Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) menjadi salah satu bukti bahwa pemerintahan Orde Baru ingin memasyarakatkan Pancasila melalui P4, Ketetapan MPR No II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila juga menjadi acuan utama

pemerintah Orde Baru dalam mengambil langkah selanjutnya untuk melahirkan Pers Pancasila sekaligus melahirkan Undang Undang Pokok Pers yang baru yang berpedoman pada ideologi Pancasila yang pada saat itu sangat gencar dikampanyekan oleh pemerintahan Orde Baru. TAP MPR No. IV Tahun 1978 tentang Garis Besar Haluan Negara menjadi salah satu landasan dalam merumuskan ide sistem pers Pancasila yang berpedoman pada Undang Undang Dasar 1945 dan Lima Butir Sila Pancasila.

Pers Pancasila pada masa Orde Baru mempunyai peranan besar dalam sejarah perkembangan kehidupan pers Indonesia, pada masa inilah pers Indonesia masuk pada pers industrial yang semakin memajukan kehidupan pers baik dari segi profesionalitas maupun segi manajemen dalam pers terutama manajemen redaksi dan keuangan. Pers Pancasila diperjuangkan menjadi pers yang bebas dan bertanggungjawab yang selanjutnya memberikan jalan kepada berlakunya pers Indonesia yang sehat, tanpa breidel dan tanpa pengekangan. Sayangnya implementasi yang terjadi pada masa berlakunya sistem Pers Pancasila tidak sesuai harapan, pengekangan kebebasan pers dan breidel kembali menyertai kehidupan pers Indonesia dibawah kemajuan industrinya. Penelitian ini mengambil tema mengenai pers Pancasila, mulai dari latar belakang, identitas sistem pers Pancasila serta perbedaannya dengan berbagai sistem pers lain di dunia, implementasi sistem pers Pancasila hingga perubahan serta dampak dari diterapkannya sistem pers Pancasila pada masa Orde Baru.

Pers Pancasila menjadi kebijakan sistem pers masa Orde Baru untuk menciptakan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggungjawab, menghapuskan pengekangan dalam pers dan memperjuangkan kebebasan dalam pers menjadi salah satu tujuan dari pers Pancasila untuk menciptakan sistem pers yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yakni ideologi Pancasila, meskipun demikian sistem pers Pancasila pada implementasinya mengalami banyak kerancuan, selain pembahasan mengenai implementasi tersebut, peneliti juga membahas mengenai perumusan, pengesahan atas sistem pers Pancasila, masalah yang muncul serta dampak yang ditimbulkan dari berlakunya kebijakan sistem pers Pancasila pada masa Orde Baru yang oleh peneliti dibahas dalam penelitian yang berjudul: "Pers Pancasila: Kehidupan Pers pada masa Orde Baru (Tahun 1978 - Tahun 1993)".

METODE

Untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Terdapat empat tahapan di dalam metode Penelitian Sejarah yaitu¹ :

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yakni *heureskeinyang* berarti menemukan. Heuristik merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan. Penulis mengumpulkan sumber terkait hal yang diteliti berdasarkan sumber primer dan sekunder.

Pada tahap heuristik peneliti akan melakukan pengumpulan data-data sebagai sumber yang diperlukan baik itu berupa sumber utama berupa Peraturan Pemerintah, wawancara serta surat kabar yang sejaman dengan berlakunya kebijakan sistem pers Pancasila pada masa Orde Baru antara tahun 1978-1993 serta sumber pendukung berupa buku-buku yang membahas tentang pers Pancasila dan kebebasan pers, serta dinamika pers pada masa Orde Baru di berbagai tempat yang memungkinkan untuk didapati data seperti Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Nasional, Badan Arsip Nasional, Perpustakaan Medayu Agung, Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Surabaya serta berbagai tempat lain.

2. Kritik

Kritik (pengujian) terhadap sumber terdiri dari kritik ekstern pengujian terhadap otentikitas, asli, turunan, palsu serta relevan tidaknya suatu sumber. Kritik intern yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Tujuan dari kritik adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta. Peneliti membandingkan data-data dari sumber primer dan sekunder mengenai tema yang dibahas, dari sumber primer dan sekunder di peroleh sebuah data bahwa keduanya ada keterkaitan dengan kebenaran atau kenyataan yang ada.

Kritik merupakan tahap kedua dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini peneliti melakukan kritik berupa kritik intern terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan melalui tahap heuristik, kritik intern dilakukan dengan cara mengklasifikasi berbagai sumber tersebut baik itu yang berupa sumber utama maupun pendukung untuk mendapati sumber yang sah atau kredibel sebagai fakta yang dibutuhkan dan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai pers Pancasila.

3. Intepretasi

¹Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, Surabaya: Unesa University Press, 2005), halaman. 10-11.

Interpretasi merupakan tahap ketiga dalam penelitian sejarah. Pada tahap interpretasi peneliti melakukan interpretasi dengan mengaitkan fakta-fakta yang telah didapat dalam berbagai surat kabar sejaman pada masa Orde Baru, peraturan Pemerintah, serta fakta-fakta lain yang telah didapati untuk selanjutnya fakta-fakta tersebut diinterpretasikan dengan teori serta kajian dalam buku-buku yang berkaitan untuk mendapati hasil yang di inginkan berkenaan dengan bagaimana sejarah, implementasi serta dampak dari kebijakan diberlakukannya sistem pers Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap keempat dalam penelitian sejarah, pada tahap inilah penulisan sejarah dilakukan. Pada tahap historiografi rangkaian fakta yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau ceritera sejarah.² Pada tahap ini peneliti menyusun berbagai fakta yang sudah diinterpretasikan dan menuliskan hasil penelitian dalam sebuah tulisan ilmiah sesuai dengan kaidah baik dan benar serta disusun secara kronologis historis dan sistematis sesuai dengan tema yakni "*Pers Pancasila, Kehidupan Pers pada masa Orde Baru (Tahun 1978 – Tahun 1993)*".

PEMBAHASAN

A. Sistem Pers di Dunia

Secara umum terdapat empat teori sistem pers di dunia yang meliputi sistem pers otoriter, sistem pers liberal, sistem pers komunis dan sistem pers tanggungjawab sosial (*social responsibility*).³ Keempat sistem pers tersebut dibedakan berdasarkan implementasi kehidupan demokrasi sebuah Negara dan kebebasan pers yang dianut oleh sebuah Negara tersebut, Negara yang menjunjung demokrasi akan sejalan dengan pers yang bebas begitu pula sebaliknya, Negara yang tidak berasas demokrasi akan mendapati pers yang tidak bebas.

B. Perbandingan Sistem Pers Pancasila dengan Sistem Pers Liberal

Pers liberal dan pers Indonesia memiliki berbagai perbedaan mulai dari segi ideologi yang dianut, falsafah kenegaraan serta fungsi pers yang berlaku. Pers liberal berideologi liberalis dengan falsafah yang mengutamakan kebebasan individual sebagai hak asasi yang mutlak dimiliki

oleh setiap orang, fungsi pers yang berlaku menerapkan kebebasan pers yang sangat bebas, menjadi tempat mengeluarkan opini publik, kritik sosial terhadap pemerintahan dan sebagai kekuatan keempat setelah eksekutif, yudikatif dan legislatif yang dapat menggulingkan sebuah kekuasaan. Sedangkan pers Indonesia berideologi Pancasila dengan falsafah yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan individu lain dan norma yang berlaku dalam masyarakat, fungsi pers yang berlaku menerapkan sistem pers yang bebas bertanggungjawab, menerapkan sistem pers yang bebas namun memiliki batasan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

C. Latar Belakang Lahirnya Sistem Pers Pancasila

Pers pancasila secara politis dilatarbelakangi oleh dua peristiwa besar pembreidelan pers masa Orde Baru yakni peristiwa Malari pada Januari 1974 dan pembreidelan bulan Januari 1978. peristiwa Malari pada Januari 1974 membawa imbas pada pembreidelan permanen 12 surat kabar yang dituduh memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan kepemimpinan nasional dan tulisan-tulisan surat kabar tersebut dianggap menghasut rakyat, memberitakan isu modal asing, kebobrokan aparat pemerintah dan lain-lain sehingga membuka peluang yang mematangkan situasi kekacauan pada tanggal 15 Januari 1974.⁴

Pembreidelan kedua merupakan pembreidelan terhadap 14 penerbitan termasuk 7 surat kabar utama di Jakarta yakni Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, Pos Sore, Sinar Pagi dan The Indonesian Times. Pembreidelan yang pada Januari 1978 terjadi karena surat kabar yang bersangkutan melakukan pemberitaan secara besar-besaran mengenai peristiwa protes mahasiswa kepada pemerintahan Orde Baru mengenai kebijakan sosial ekonomi politik, kampanye anti korupsi juga protes terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Pembreidelan Januari 1978 ini bersifat sementara karena beberapa minggu setelahnya surat kabar yang di breidel dapat terbit kembali setelah melakukan negosiasi dengan pemerintahan Orde Baru.

Perbedaan sikap yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru terhadap dua pembreidelan yang terjadi pada Januari 1974 dan Januari 1978 merupakan perubahan pola sikap Orde Baru yang cenderung lebih kooperatif pada

²Aminuddin Kasdi, *Ibid.*,

³Krisna Harahap. 1996. *Kebebasan Pers di Indonesia: Kaitannya dengan Surat Izin*. Jakarta: PT Grafiti Budi Utami, hlm. 36-37.

⁴David T Hill. 2011. *Jurnalisme dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 146.

pembreidelan Januari 1978. Perbedaan sikap ini mengisyaratkan keinginan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pers dari dalam karena dirasa lebih efektif, untuk itulah pemerintah Orde Baru memberikan “angin segar” berupa Ketetapan MPR No. II dan IV tahun 1978 mengenai perubahan Undang-Undang Pokok Pers dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk menenangkan pers nasional yang pada tahun 1978 mengalami gejolak.

D. Lahirnya Sistem Pers Pancasila

Keinginan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pers dari dalam berlanjut dengan direalisasikannya Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 mengenai berlakunya sistem pers Pancasila dan penghapusan Surat Izin Terbit untuk meyakinkan insan pers pada pemerintahan Orde Baru dan bahwa sistem pers yang baru merupakan sistem pers yang bebas dari sensor dan breidel sesuai dengan yang diharapkan oleh penerbitan pers.

Pada tahun 1984 melalui Sidang Pleno Dewan Pers ke XXV di Surakarta diperkuat kembali oleh Dewan Pers sendiri bahwa sistem pers Indonesia adalah sistem pers Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 dan UUD 1945 yang mewujudkan pers bebas dan bertanggungjawab dan menciptakan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.

E. Implementasi Pers Pancasila

Tahun 1984 menjadi tahun dimana permainan politik Orde Baru atas kebebasan pers terlihat nyata dan terstruktur setelah disahkannya Peraturan Menteri Penerangan (PERMENPEN) No. 1 Tahun 1984 oleh Menteri Penerangan Harmoko yang berisi tentang pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) serta ketentuan-ketentuan mengenai SIUPP tersebut. Kebebasan pers menjadi hal yang tidak bisa dijamin lagi setelah keluarnya Permenpen ini, pers Indonesia pada masa pers Pancasila kembali mengalami masa yang tidak menyenangkan dengan bayangan breidel yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui pencabutan surat izin penerbitan pers seperti yang terjadi pada Januari tahun 1974 dan Januari tahun 1978.

Pencabutan surat izin (breidel) benar-benar terjadi pada masa berlakunya pers Pancasila, beberapa pembreidelan dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru seperti pada tahun 1986, 1987 dan 1990 dilakukan pada surat kabar besar nasional. Pada 1986 surat kabar Sinar Harapan pada tanggal 9 Oktober 1986, Sinar Harapan dibreidel karena menulis tentang devaluasi rupiah dalam terbitannya edisi 12 September 1986, serta

pada edisi 8 Oktober menyoroti rencana pemerintah mencabut izin dari 44 monopoli impor. Langkah pembreidelan dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dengan dalih bahwa Sinar Harapan telah menciptakan suasana tidak sehat, membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat.⁵

Pemerintahan Orde Baru memberikan pembatalan pembreidelan bersyarat kepada Sinar Harapan untuk menunjukkan sikap kooperatif yang sebenarnya semu terhadap pers, setelah mengalami negosiasi panjang dan rumit, terjadi kesepakatan sejumlah perombakan dari redaksional Sinar Harapan, berbagai perombakan redaksional tersebut akhirnya membuat Sinar Harapan mendapatkan izin SIUPP baru untuk menerbitkan surat kabar baru yakni Suara Pembaharuan pada 3 Februari 1987 dengan pemimpin umum dari anggota DPR Partai Golkar.

Pembreidelan berikutnya menimpa harian Prioritas. Harian Prioritas, harian ekonomi yang terbit di Jakarta dibreidel pada 29 Juni 1987. Menurut Menteri Penerangan harian Prioritas dicabut surat izinnya karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagai surat kabar yang seharusnya memuat berita ekonomi 75% dan 25% untuk tulisan umum. Konten berita Prioritas juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sistem pers Pancasila” dan melanggar sejumlah peraturan dan perundang-undangan pers, sering memuat kabar yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta.⁶ Namun beberapa pengamat menganggap tuduhan pemerintah terhadap harian Prioritas tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat sebagai reaksi dari kepercayaan masyarakat mengenai akuratnya prediksi harian Prioritas selama kurun waktu terakhir mengenai buruknya kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru.

Tabloid Monitor (mingguan) pada Oktober 1990 juga dicabut izinnya karena memuat polling 100 orang terkemuka yang menempatkan Nabi Muhammad di posisi ke-11. Angket popularitas yang dimuat dalam monitor 15 Oktober dinilai menghina kelompok muslim garis keras, dalam angket tersebut Nabi Muhammad ada posisi 11, tempat pertama adalah Soeharto sementara Arswendo Atmo berada di posisi 10 (pemilik monitor). Kelompok Islam menuntut Surat kabar ini ditutup dan pemimpin redaksinya dipenjarakan, akhirnya pemimpin redaksi dipenjarakan selama 5 tahun dengan tuduhan menghina agama. kasus yang terjadi pada mingguan hiburan populer Monitor

⁵ Yasuo Hanazaki. 1998. *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, hlm. 92.

⁶ Yasuo Hanazaki. *Ibid*, hlm. 22.

menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat sendiri terdapat sekelompok orang yang bersuara lantang dan punya pengaruh.

F. Dampak Kebijakan Sistem Pers Pancasila

Berlakunya kebijakan sistem pers Pancasila pada masa Orde Baru membawa berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan pers Indonesia baik dampak positif maupun dampak negatif. Dari segi dampak positif, pers masa pers Pancasila mengalami berbagai peningkatan termasuk dalam peningkatan profesionalitas wartawan, peningkatan jenjang pendidikan wartawan, berbagai seminar, penataran dan temu wicara yang dilakukan menghasilkan peningkatan kemampuan insan pers dalam mengolah pemberitaan, peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya minat baca masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan informasi melalui media cetak, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya tiras surat kabar pada akhir 1970-an hingga awal 1990-an yang signifikan.

Ekspansi perusahaan besar pers kepada surat kabar kecil menjadi gaya baru dalam industri pers masa pers Pancasila sebagai dampak dari kerjasama manajemen dan penanaman modal untuk tetap menjaga media pers yang sudah memiliki SIUPP agar tetap hidup, mengingat sulitnya memperoleh SIUPP baru karena persyaratan yang rumit. Surat kabar yang di ekspansi oleh imperium besar pers meliputi sebagian besar kota-kota di Indonesia membawa dampak pada penyebaran surat kabar yang lebih merata dan tentunya stabilnya tiras dari imperium besar pers tersebut.⁷

Berlakunya pers Pancasila masa Orde Baru juga berdampak negatif terhadap kehidupan pers Indonesia. Setelah berlakunya peraturan Menteri Penerangan mengenai SIUPP dan pembatalannya maka secara otomatis kebebasan pers menjadi sangat terbatas, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sangat terstruktur dan rapi, pers Pancasila digunakan sebagai pelindung berlangsungnya pemerintahan Orde Baru atas kritik sosial pers dari dalam tubuh pers itu sendiri.

Masuknya berbagai modal besar berdampak pada kemajuan ekonomi dalam pers yang selanjutnya membawa industri pers pada kemapanan ekonomi. Pencapaian kemapanan yang dimiliki membuat pers mengalami perubahan orientasi, pers tidak lagi berfungsi sebagai kritik sosial, namun sudah berorientasi

menjadi industri yang mengejar keuntungan laba, di bawah kendali SIUPP pers menjadi lebih lunak terhadap pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers menjadi semu, karena pers harus ikut aturan main pemerintah Orde Baru untuk tetap hidup dan menghindari kerugian besar karena breidel.

PENUTUP

Pers Pancasila menjadi alat kontrol pemerintahan Orde Baru terhadap pers nasional, alat kontrol yang dilakukan dari dalam tubuh pers yang terstruktur dengan baik. Pemerintahan Orde Baru memanfaatkan sistem pers Pancasila untuk melakukan breidel terhadap pers yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah dengan alibi pembreidelan karena berita dalam pers mengganggu stabilitas nasional dan tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila.

Kontrol dari dalam tubuh pers melalui pers Pancasila menjadi kemenangan mutlak bagi pemerintahan Orde Baru terhadap kebebasan pers nasional, pers terus berada dibawah bayang-bayang breidel dengan tetap berlakunya pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Pada implementasi pers Pancasila mengalami pengekangan kebebasan pers, bahkan pers kehilangan fungsi kritik sosialnya, meskipun demikian, pada masa implementasi pers Pancasila ini jugaterjadi perkembangan industri pers yang sangat pesat melalui masuknya modal-modal dalam perusahaan pers yang memiliki SIUPP, pesatnya perkembangan ekonomi perusahaan pers berimbas pada kebutuhan peningkatan profesionalitas wartawan dan pemberitaan dalam pers yang semakin membaik.

Mantabnya stabilitas ekonomi dalam perusahaan pers pada awal tahun 1990-an membawa perubahan pola pers menjadi lebih liberal yang menuntut pada kebebasan pers yang nyata, kebebasan pers dari breidel dan sensor serta penghapusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers untuk mengembalikan kehidupan pers yang bebas sesuai dengan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dokumen/Arsip/UU

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ TAP MPR Nomor IV Tahun 1978 tentang Garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Garis Besar Haluan Negara.

⁷ Ana Nadhya Abrar. 1992. *Pers Indonesia: Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 49.

Peraturan Menteri Penerangan/ PERMENPEN Nomor 1 tahun 1984 tentang Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers.

B. Sumber Koran/Surat Kabar

Jawa Pos, Sabtu 11 Februari 1989. "Beda, Kontrol Sosial Pers Dulu dan Kini"

Kompas, Sabtu 28 Agustus 1976. "Pers Pancasila Bagaimana Rumusnya?"

Kompas, Kamis 24 Juli 1980. "Bagaimana Wujud Pembinaan Pers Bebas dan Bertanggung-Jawab?"

Kompas, 6 Desember 1984. "Pers Indonesia Didiskusikan"

Kompas, 8 Desember 1984. "Pers Nasional Hendaknya Menjadi Pers Pembangunan"

Merdeka, Sabtu 29 Nopember 1980. "Pers Wajib Beri Informasi Terbaik untuk Rakyat"

Merdeka, Senin 6 April 1981. "Letak Tanggung Jawab dan Peranan Pers"

Pelita, Rabu 10 Nopember 1982 "Ideal Penerbitan Pers Memiliki Percetakan"

Pelita, 30 Nopember 1982. "Penghapusan SIT Bukan Hidupkan Pers Liberal"

Pelita, 24 Desember 1982. "Pers Tetap Waspada Bahaya Latent Komunis"

Suara Karya, Jum'at 23 April 1982. "Pancasila Bukan Hadiah dari Siapapun dan Golongan Manapun"

Sinar Harapan, Kamis 1 Februari 1979. "Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab"

Surabaya Post, Rabu 9 Februari 1983. "Jauhkan Pers dari Berita Murah"

C. Sumber Jurnal

Hars, Nasruddin. "Pers Indonesia setelah 15-16 Januari". *Pers Indonesia* No. 1 Tanggal 11 Januari 1976.

Lee, Oey Hong. "Indonesia Government and Press During Guided Democracy". *University of Hull, Monographs on Southeast Asia, Inter Documentation Company AGZUG, Switzerland*. 1971.

D. Sumber Buku

Abar, Akhmad Zaini. 1995. *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LKis

Arifin, Anwar. 1992. *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*. Jakarta: Media Sejahtera.

Arifin, Marzuki. 1974. *Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Publishing House Indonesia

Asy'ari, Hasyim. 2009. *Pembreidelan Tempo 1994 – Wajah Hukum Pers Sebagai Alat Represi Politik Negara Orde Baru*. Jakarta: Pensil

Assegaf, Dja'far H. *Jurnalistik Massa Kini: Pengantar Ke Praktek Kewartawanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991

Atmadi, T. 1986. *Sistem Pers Indonesia: Catatan dan Teks Kuliah*. Jakarta: Gunung Agung.

Atmakusumah. 1981. *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

Dahlan, Alwi. *Sistem Komunikasi di Indonesia Bagi Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: PT Inscore.

Gandhi, M.L. 1985. *Undang-Undang Pokok Pers: Proses Pembentukan dan Penjelasannya*. Jakarta: C.V. Rajawali.

Hanazaki, Yasuo. 1998. *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Harahap, Krisna. 1996. *Kebebasan Pers di Indonesia: Kaitannya dengan Surat Izin*. Jakarta: PT Grafiti Budi Utami.

Haryanto, Ignatius. 2006. *Indonesia Raya Dibredel!*. Yogyakarta: LKiS

Hill, T David. 2011. *Pers di Masa Orde Baru: Edisi I*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

_____. 2011. *Jurnalisme dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Islam, Roumeen. 2006. *The Right To Tell: The Role of Mass Media in Economic Development*. Jakarta: The World Bank Institute.

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Krisnawan, Yohanes. 1997. *Pers Memihak Golkar?!*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan.

Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter Ke Liberal*. Yogyakarta: LKiS

McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa – Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Nadhya Abrar, Ana. 1992. *Pers Indonesia: Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*. Yogyakarta: Liberty.

Naomi, Omi Intan. 1996. *Anjing Penjaga*. Depok: Gorong Gorong Budaya

Oetama, Jakob. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.

Said, Tribuana. 1988. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: PT Saksama.

Schramm, Wilbur. *Four Concept of Mass Communication*, dalam F. Rahmadi. 1990.

- Perbandingan Sistem Pers.* Jakarta: Gramedia.
- Seno Adji, Oemar. 1977. *Mass Media dan Hukum.* Jakarta: Erlangga.
- Siregar, Ashadi. 1996. *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel dan Opini Untuk Media Massa.* Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 1982. *Bagaimana Menjadi Penulis Media Massa.* Jakarta: PT Karya Unipress.
- Wibowo, Wahyu. 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika.* Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Wonohito, M. *Tehnik Jurnalistik dalam Sistem Pers Pancasila.* Jakarta: Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan RI.



UNESA
Universitas Negeri Surabaya

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA